

DAMPAK PANDEMI COVID 19 PADA UNIT USAHA PARIWISATA DI KAWASAN PESISIR KOTA KUPANG

Yudha Eka Nugraha

*Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri Kupang
Jl. Adisucipto PO. BOX.139 Kupang
Email Korespondensi: yudhaekanugraha@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi dan analisis dampak ekonomi yang muncul selama pandemic COVID-19 pada unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang. Metode campuran kualitatif dan kuantitatif deskriptif merupakan pendekatan untuk mengetahui dampak pandemic tersebut. Jenis data kuantitatif dalam penelitian ini terkait pendapatan unit usaha, pengurangan tenaga kerja, jumlah wisatawan, dan jenis data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara bersama pemilik unit usaha di kawasan pesisir Kota Kupang. Beberapa unit usaha pariwisata yakni penjual makanan lokal, penjual souvenir, jasa fotografi, dan jasa pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi pada unit usaha di kawasan pesisir Kota Kupang, kuisioner dan wawancara dengan 77 pemilik unit usaha di kawasan pesisir Kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh unit usaha pariwisata mengalami dampak penurunan pendapatan sebanyak rata-rata 70% tergantung pada jenis usahanya yaitu unit usaha makanan berupa penjual pisang kelapa, penjual salome (bakso), penjual gula lontar, penjual ikan laut, usaha kafe, usaha homestay, dan jasa fotografi. Dampak lain yang muncul adalah meningkatnya modal, pengurangan tenaga kerja pariwisata, tidak meratanya distribusi keuntungan, tutupnya unit usaha, dan kerugian lainnya. Upaya untuk meningkatkan kembali pendapatan telah dilakukan dengan menerapkan CHSE di kawasan wisata dan efisiensi anggaran di setiap unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang.

Kata Kunci: Dampak; Pandemi; Covid 19; Pariwisata; Pesisir; Unit Usaha

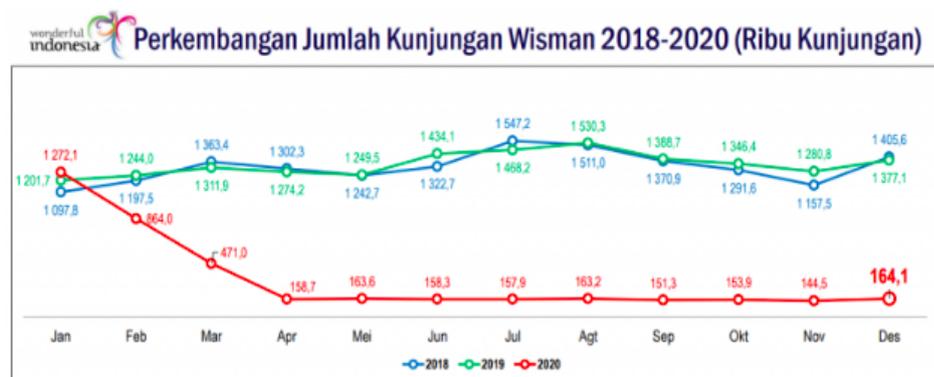
ABSTRACT

This study aims to provide a description and analysis of the economic impacts that emerged during the COVID-19 pandemic on tourism business units in the coastal area of Kupang City. The mixed qualitative and quantitative descriptive method is an approach to determine the impact of the pandemic. The types of quantitative data in this study are related to business unit income, workforce reduction, number of tourists, and qualitative data types sourced from interviews with business unit owners in the coastal area of Kupang City. Several tourism business units, namely local food sellers, souvenir sellers, photography services, and other supporting services. Data collection techniques used observations on business units in the coastal area of Kupang City, questionnaires and interviews with 77 business unit owners in the coastal area of Kupang City. The results of this study indicate that all tourism business units experienced a decrease in income by an average of 70% depending on the type of business. The business units in question are food business units in the form of coconut banana sellers, salome (meatball) sellers, palm sugar sellers, sea fish sellers, cafe businesses, homestay businesses, and photography services. Other impacts that arise are increased capital, reduced tourism workforce, unequal distribution of profits, closing of business units, and other losses. Efforts to increase income have been carried out by implementing CHSE in tourist areas and budget efficiency in each tourism business unit in the coastal area of Kupang City.

Keywords: Impact; Pandemic; Covid-19; Tourism; Coastal, Enterprise

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 terdeteksi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020 (Rosita, 2020). Sejak saat ini sampai dengan saat ini tahun 2021, pandemic telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Upaya dalam mencegah dan menekan penyebaran virus telah dilakukan dengan melakukan pengendalian penularan dan penyebaran virus COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumuman (Raditya, 2020). Pemerintah di berbagai provinsi juga mulai melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan menyosialisasikan kebijakan stay at home atau work from home selama pandemic COVID-19 berlangsung (Setyawan, dkk, 2020). Implikasi dari kebijakan ini adalah karyawan direkomendasikan untuk bekerja dari rumah kecuali untuk kepentingan mendesak yang mengharuskan keluar rumah. Kebijakan ini mempengaruhi keadaan ekonomi Indonesia karena sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki 760 ribu pekerja mandiri (termasuk didalamnya usaha kecil dan menengah) yang harus terus bekerja diluar rumah (Abdila, 2020). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja mandiri yang sangat membutuhkan keamanan keuangan terutama pada saat kebijakan ini berlangsung yang membatasi ruang gerak pelaku bisnis kecil dan menengah. Dampak lanjutan yang terjadi kemudian adalah laporan sejumlah 1,9 juta orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan karena lemahnya pengelolaan usaha dan manajemen krisis selama pandemic (Shalilah, 2020).



(Sumber : BPS, 2021)

Kementerian Koperasi menyebutkan bahwa sebesar 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami dampak pandemic akibat virus COVID 19 (Antara dalam Rosita, 2020). Pelaku usaha yang paling terdampak yakni usaha makanan dan minuman dan usaha bidang jasa produksi yang mengalami hambatan distribusi sehingga mengurangi stok barang selama kebijakan PSBB berlangsung (Rosita, 2020). Salah satu bidang unit usaha yang menjadikan makanan, minuman, dan jasa adalah pada sektor pariwisata. Tekanan pandemic COVID-19 yang mempengaruhi munculnya kebijakan-kebijakan diatas juga menyebabkan kejatuhan pada sektor pariwisata. Dengan himbauan stay at home maupun work from home, membatasi mobilitas manusia untuk melakukan perjalanan sehingga pada fase tersebut dampak yang paling mudah diestimasi adalah dampak pada penurunan jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan pada masa pandemic COVID-19.

Grafik menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia (BPS dalam EGSAUGM, 2021). Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan signifikan yang terjadi di tahun 2020. Dilaporkan baik untuk wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan yang terekam hanya berjumlah 4,02 juta kunjungan wisatawan. Jauh berada dibawah bila dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2019. Estimasi penurunan jumlah kunjungan wisatawan yakni sebesar 75,03%. Terkhusus pada bulan Desember 2020 (tercatat hanya 164.088 ribu wisatawan berkunjung) dimana wisatawan biasanya banyak melakukan perjalanan liburan, terdapat penurunan sebanyak 88,08% jika dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2019 (mencapai 1,37 juta wisatawan berkunjung) (Widjaja, 2021). Proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata pada tahun 2020 menurun yakni 4-7 miliar dollar AS, jauh menurun dibandingkan tahun 2019 dimana penerimaan devisa pariwisata mencapai 20 miliar dollar AS. Sumber lain menyebutkan hingga akhir 2020 total kerugian sektor pariwisata akibat pandemic COVID-19 dan penerapan kebijakan untuk menekan penyebarannya menyentuh angka lebih dari 10 triliun rupiah. (Hidayat, 2021). Penurunan ini disebabkan penutupan akses bagi turis-turis dari Tiongkok pada Bulan Februari saat tahun baru Cina yang merupakan peak season pagi pariwisata Indonesia. (Fabriza, 2020).

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi pariwisata dan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata, karena pandemic mengancam 13 juta tenaga kerja yang berada di sektor pariwisata dan 32,5 juta tenaga kerja yang secara tidak langsung bergantung pada sektor pariwisata. (BPS, 2020 dalam, EGSAUGM, 2021).

Mengerucut pada kondisi salah satu provinsi di Indonesia yang ditetapkan memiliki destinasi super premium Nusa Tenggara Timur kondisi keterpurukan sektor pariwisatanya tidak jauh berbeda. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan hanya sekitar 7.000 prang pada tahun 2020 yang biasanya bisa mencapat 40.000 kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya penurunan di angka 80% kunjungan dan sangat berdampak negatif pada pemasukan daerah. Penyebabnya dikarenakan penundaan perjalanan oleh wisatawan sejak Agustus sampai Oktober 2020 akibat pandemic COVID-19. (Wilibardus, 2020). Destinasi super premium Labuan Bajo juga mencatat jumlah kunjungan wisatawannya menurun hanya berjumlah 44.543 kunjungan wisatawan saja bila dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai jumlah kunjungan 256.171 kunjungan wisatawan dengan estimasi penurunan sebanyak 82% kunjungan. (Rinus dalam Suparjo, 2021)

Kebijakan PSBB juga dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui penutupan beberapa tempat yang disinyalir menjadi pusat keramaian salah satunya adalah destinasi pariwisata setempat seperti kawasan pesisir yang menjadi pusat mobilisasi wisatawan. Tentu kebijakan ini mengakibatkan kerugian yang dialami oleh unit usaha pariwisata di kawasan pesisir. Unit usaha pariwisata memerlukan modal operasional untuk melakukan kegiatan produksi barang atau jasa pariwisata. Seringkali produk yang dihasilkan bersifat *perishable* atau tidak bertahan lama seperti produk makanan, minuman, souvenir, dan jasa lainnya yang biasa menjadi sarana pendukung kegiatan pariwisata (Bartono, dkk, 2005). Selain kerugian dalam tataran modal operasional unit usaha, dampak lain yang terjadi adalah ancaman PHK bagi tenaga kerja. Karena jumlah mobilisasi wisatawan yang semakin berkurang dan pendapatan unit usaha pariwisata yang menyusut, pengelola unit usaha perlu mengurangi tenaga

kerja dan dampak yang terburuk yang harus dihadapi adalah gulung tikar. Saat ini kawasan pesisir Kota Kupang merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak pandemic COVID-19 karena pusat kegiatan ekonomi pariwisata salah satunya selama ini berlangsung di kawasan pesisir. Dengan keunggulan unit usaha pariwisata yang menjual makanan berupa makanan tradisional, minuman tradisional, olahan kreatif lainnya yang diproses secara tradisional, dan kegiatan wisatawan lainnya yang didukung oleh usaha jasa pariwisata di kawasan pesisir.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang yang terdampak pandemic COVID-19. Konsep yang digunakan dalam mendeskripsikan dampak pandemic COVID-19 pada unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang yakni dampak ekonomi pariwisata yang terdiri dari 8 kategori (Pitana, 2009 dalam Hermawan, 2016) yakni: (1) dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap penerimaan masyarakat, (3) dampak pada tenaga kerja, (4) dampak pada distribusi keuntungan, (5) dampak pada kepemilikan masyarakat, (6) dampak pada pembangunan, (7) dampak pada pendapatan pemerintah.

Pada penelitian ini dampak ekonomi yang akan diteliti berfokus pada dampak terhadap penerimaan masyarakat, dampak pada tenaga kerja, dan dampak pada distribusi keuntungan. Penelitian dilanjutkan dengan menganalisis dampak ekonomi pariwisata yang muncul kemudian merekomendasikan upaya-upaya untuk memulihkan ekonomi pariwisata di kawasan pesisir dengan beradaptasi pada era normal baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif serta jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah pengkajian yang dilakukan melalui pengumpulan data berupa kata, gambar, dan data selain angka yang berhasil dikumpulkan terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, dalam Susilowati, 2017). Metode kuantitatif kualitatif deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada dampak pandemic covid 19 yang dirasakan oleh unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni jenis data kualitatif dan jenis data kuantitatif. Jenis data kualitatif dikumpulkan melalui hasil wawancara (Sugiyono, 2015) dengan pengelola unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang, dan jenis data kuantitatif dikumpulkan dengan menghitung karakteristik pengelola unit usaha berdasarkan jenis kelamin, umur, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan rasio penurunan pendapatan akibat pandemic yang terjadi, rasio penurunan jumlah tenaga kerja unit usaha pariwisata, dan jumlah penurunan jumlah unit usaha.

Sumber data primer diperoleh dari lapangan yakni pengelola unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang yaitu Pantai Lasiana, Pantai Warna, dan Pantai Pasir Panjang, namun terdampak pandemic covid 19. Data sekunder diperoleh melalui dukungan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi lapangan pada pengelola unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang dan wawancara dengan 77 pengelola unit usaha pariwisata yang masih dapat ditemui di Kawasan Pesisir Kota Kupang.

Teknik analisis data adalah dengan melakukan reduksi data hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai dampak pandemic covid terhadap unit usaha

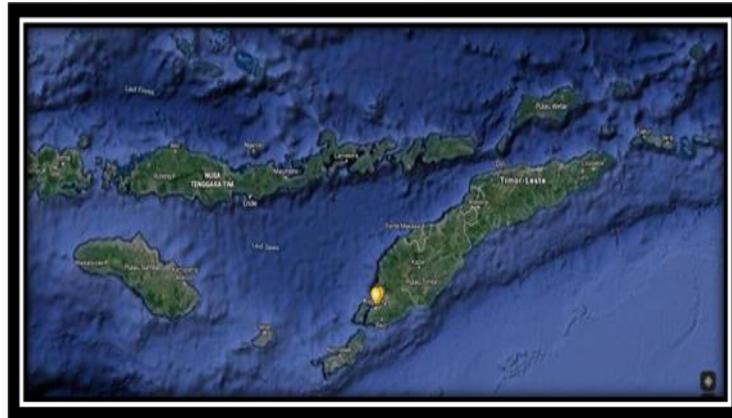
pariwisata, verifikasi triangulasi (Zamili, 2015) untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kawasan Pesisir dan Unit Usaha Pariwisata Pesisir Kota Kupang

Damaledo, 2003 dalam Baun, 2008 mencatat sejarah pengembangan kawasan pesisir Kota Kupang sejak penjajahan Belanda yang pembangunan pelabuhan di Kelurahan LLBK (Lahi Lai Bissi Kopan) yang sampai pada masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 terkenal dengan kegiatan perdagangan dan tempat bermukim nelayan di Pantai Oeba, Pantai Nunhila, Pantai Oesapa, dan Pantai Kelapa Lima. Hingga pada perkiraan tahun 1990-an kawasan pesisir di Kota Kupang mulai mengalami perkembangan karena adanya pengalihan status Kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Dati II Kupang pada tahun 1996.

Pengembangan ini ditandai dengan kemunculan Pantai Lasiana beserta penunjang pariwisata berupa hotel dan restoran di sekitar Pantai Pasir Panjang. Hingga saat ini, perkembangan kawasan pesisir pantai Kota Kupang diarahkan pada pengembangan kegiatan yang bernilai ekonomis seperti kegiatan pariwisata di Pantai Lasiana, Pantai Warna Oesapa, dan Pantai Pasir Panjang, pengembangan hotel, dan restoran di Pantai Kelapa Lima, Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di



Gambar 1. Titik lokasi penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang,
(Sumber:googlemaps.com,2021)

Pantai Oeba, serta beberapa kawasan pemukiman yang terletak di kawasan pantai oleh masyarakat pendatang. Berdasarkan status kepemilikan, lahan kawasan pesisir sebagian besar adalah milik masyarakat lokal, sebagian kecilnya milik negara diantaranya Taman Kota dan terminal Kota Kupang di Kelurahan Lahi Bissi Kopan, tempat parkir area pertokoan LLBK, Taman Kota dan Restoran Teluk Kupang di Kelurahan Pasir Panjang, kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kelurahan Fatubesi, dan Pantai Wisata di Kelurahan Lasiana (Laporan tahunan, 2007 dalam Baun, 2008)



Gambar 2. Peta Lokasi dalam Google Maps 2021, lokasi penelitian ditandai dengan titik kuning dari kiri ke kanan adalah (a) Pantai Pasir Panjang, (b) Pantai Warna, (c) Pantai Lasiana

Secara administrative wilayah pesisir Pantai yang ditentukan dalam penelitian ini adalah pesisir di kawasan Kota Kupang yang terbagi kedalam tiga kecamatan yakni Kecamatan Alak, Kecamatan Kota Lama, dan Kecamatan Kelapa Lima. Pada tahun 2015, tercatat jumlah penduduk pada ketiga Kecamatan tersebut yakni: Kecamatan Alak berjumlah 59.948 jiwa dengan luas 86,91 km², Kecamatan Kota Lama dengan jumlah penduduk 34.075 dengan luas daerah 15,02 km², dan Kecamatan Kelapa Lima dengan jumlah penduduk 73.523 dengan luas daerah 3,22 km². Berdasarkan dokumen Review Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Kupang Tahun 2017-2021, jumlah penduduk miskin Kota Kupang mengalami fluktuasi sejak tahun 2003-2013. Data ini menunjukkan kenaikan jumlah masyarakat miskin pada tahun 2008 berjumlah 46.110 jiwa yang kemudian menurun hingga meningkat lagi pada tahun 2012 berjumlah 35.000 jiwa dengan. Pada tahun 2014 penduduk miskin Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi berjumlah 330.300 jiwa dan penduduk miskin NTT berjumlah 991.880 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin dalam periode tersebut mengalami kenaikan dan juga penurunan secara fluktuatif.

Sebagian besar penduduk yang terletak di tiga kecamatan tersebut tinggal di wilayah pesisir. Dalam penelitian ini, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memiliki tiga lokasi pantai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi pariwisata dengan keberadaan unit usaha pariwisata di kawasan pesisir yakni: (1) Pantai Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, (2) Pantai Lasiana Kecamatan Kelapa Lima, dan (3) Pantai Warna Kecamatan Kelapa Lima. Berdasarkan hasil observasi, jumlah unit usaha pada ketiga pantai ini yakni: (1) Pantai Pasir Panjang berjumlah 82 unit usaha pariwisata, (2) Pantai Lasiana berjumlah 33 unit usaha pariwisata, (3) Pantai Warna Kecamatan Kelapa Lima berjumlah 93 unit usaha pariwisata (Fanggidae, 2019). Dari jumlah tersebut, penelitian ini mengambil sampel sejumlah unit usaha yang dapat dijumpai selama proses penelitian yakni: (1) Pantai Pasir Panjang dengan sampel berjumlah 36 unit usaha pariwisata, (2) Pantai Lasiana dengan sampel berjumlah 23 unit usaha pariwisata, (3) Pantai Warna Kecamatan Kelapa Lima dengan sampel berjumlah 21 unit usaha pariwisata.

Karakteristik Pengelola Unit Usaha Pariwisata di Kawasan Pesisir Kota Kupang

Hasil observasi dan studi kepustakaan mengenai jumlah unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang pada tiga pantai yang menjadi lokasi penelitian terinci

sebagai berikut, (1) Pantai Pasir Panjang berjumlah 82 unit usaha pariwisata, (2) Pantai Lasiana berjumlah 33 unit usaha pariwisata, (3) Pantai Warna Oesapa berjumlah 93 unit usaha pariwisata (Fanggidae, 2019). Total unit usaha pariwisata yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 208 unit usaha pariwisata yang beroperasi di kawasan pesisir Kota Kupang. Dari jumlah tersebut, penelitian yang telah dilakukan sejak awal tahun 2020 hingga pandemic COVID-19 melanda telah berhasil melakukan elaborasi melalui teknik wawancara mendalam dengan 77 unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang. Jumlah unit usaha tersebut terdiri dari pengelola unit usaha bidang makanan, minuman, oleh-oleh (souvenir) tradisional, pemilik kafe, karaoke, jasa fotografi, homestay, dan kuliner seafood. Berikut adalah karakteristik pengelola unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang yang berhasil diwawancarai:

Tabel 1. Karakteristik Pengelola Unit Usaha Pariwisata Kawasan Pesisir Kota Kupang

No	Karakteristik Pengelola Unit Usaha	Jumlah Responden	Pantai Kawasan Pesisir Kota Kupang		
			Pantai Lasiana	Pantai Warna	Pantai Pasir Panjang
1	Jenis Kelamin				
	Laki-Laki	35	4	14	17
	Perempuan	42	19	7	16
	TOTAL	77	23	21	33
2	Usia				
	< 30 tahun	4	2	1	1
	31 – 40 tahun	28	9	5	14
	> 40 tahun	32	12	15	18
	TOTAL	77	23	21	33
3	Status Pernikahan				
	Menikah	73	22	20	31
	Belum Menikah	4	1	1	2
	TOTAL	77	23	21	33
4	Tingkat Pendidikan				
	SD	58	18	16	24
	SMP	8	1	2	5
	SMA	6	2	1	3
	Diploma	4	1	2	1
	S1	1	1	-	-
	TOTAL	77	23	21	33

Sumber: Olahan penelitian, 2021

Berdasarkan data penelitian mengenai karakteristik unit usaha pariwisata yang berhasil dihimpun, menunjukkan bahwa sebanyak 42 pengelola berjenis kelamin perempuan setara dengan presentase sebesar 54% dibanding dengan pengelola unit usaha yang berjenis kelamin laki-laki. Jika ditelusuri lebih lanjut, dominasi pengelola unit usaha perempuan terdapat pada pengelola dari Pantai Lasiana. Sedangkan pada dua pantai lainnya (Pantai Warna dan Pantai Pasir Panjang) jumlah pengelola unit usaha pariwisata didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin mempengaruhi produk pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Pada DTW Pantai Lasiana, produk yang ditawarkan hampir sejenis, berupa makanan tradisional pisang gepe, minuman berbahan dasar lontar, air kelapa, oleh-oleh berupa gula merah yang berbahan dasar nira lontar

sehingga perempuan lebih banyak mengelolanya. Berbeda dengan karakteristik unit usaha pariwisata di Pantai Warna yang lebih bervariasi terdiri dari produk makanan dan minuman, usaha karaoke, usaha kafe, dan persewaan tempat untuk menikmati sunset. Sehingga pengelola laki-laki lebih dominan. Sama halnya dengan pengelola unit usaha di Pantai Pasir Panjang yang merupakan penjual seafood (makanan laut berupa ikan, cumi, dan sejenisnya) laki-laki lebih mendominasi untuk menyediakan layanan pembersihan ikan, membakar ikan, dan menyajikannya kepada wisatawan.

Berdasarkan usia, pengelola unit usaha pariwisata di ketiga pantai tersebut didominasi oleh mereka yang berusia diantara 30-40 tahun dengan jumlah 41 orang atau sekitar 53% dari pengelola unit usaha yang berhasil diwawancarai. Disusul oleh mereka pengelola yang berusia diatas 40 tahun dengan jumlah 32 atau setara dengan 41%. Sebanyak 73 pengelola unit usaha pariwisata atau setara dengan 95% memberikan keterangan telah memiliki keluarga dalam artian sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola unit usaha memiliki tanggungan baik suami, istri, anak, maupun tanggungan lain yang ada didalam keluarga. Selanjutnya, karakteristik berdasarkan pendidikan, sebanyak 58 pengelola unit usaha merupakan mereka yang berpendidikan terakhir sekolah dasar yakni sebesar 75%, sisanya sebesar 25% berpendidikan terakhir SMP, SMA, diploma, dan sarjana.

Kondisi Unit Usaha Pariwisata Kawasan Pesisir Kota Kupang Sebelum Pandemi Covid-19

Aspek ekonomi dalam unit usaha pariwisata sangat memengaruhi berbagai sektor mulai dari skala kecil, menengah hingga skala besar karena usaha pariwisata saling memengaruhi (Wirateja, 2014). Kondisi ini mampu memotivasi perekonomian di wilayah setempat, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, dan membuka kesempatan untuk dapat berwirausaha dalam bidang kerajinan, makanan dan minuman, dan usaha jasa pariwisata lainnya yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan kondisi ekonomi pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang sebelum pandemic.



Gambar 3. Suasana Unit Usaha Pantai Warna Oesapa yang tertata dan ramai pengunjung
sumber: dokumentasi google tahun 2018

Sebelum Pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB Kota Kupang dilaksanakan, kegiatan pariwisata pesisir di Kota Kupang merupakan salah satu destinasi yang paling diminati oleh wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Kupang. Unit usaha pariwisata di ketiga pantai kawasan pesisir Kota Kupang melayani pembelian produk pariwisata selama 7 hari dalam seminggu. Terkhusus pada Pantai Warna Oesapa dan Pantai Pasir Panjang, interaksi antara wisatawan dan pengelola unit usaha pariwisata terjadi hingga dini hari pada jam 2 WITA waktu setempat.

Beberapa pengelola unit usaha pariwisata yang menyediakan makanan dan minuman dapat memperoleh keuntungan sampai dengan 100% dari modal yang mereka putar untuk membeli barang-barang jualan seperti kelapa, pisang, buah lontar (dalam Bahasa lokal: saboak), berbagai minuman kemasan, rokok, kopi, dan mie instan. Wisatawan yang melakukan transaksi sebelum datangnya pandemic COVID-19 dan kebijakan PSBB diberlakukan bisa berjumlah sampai 30 bahkan 50 kunjungan transaksi. Jam operasional pantai sudah buka sejak jam 07.00 WITA sampai jam 18.00 WITA di Pantai Lasiana bahkan lebih jika ada event yang mendatangkan lebih banyak wisatawan yang datang. Begitu pula dengan kondisi di Pantai Warna Oesapa dan Pantai Pasir Panjang, wisatawan yang melakukan interaksi ekonomi pariwisata dapat melayani lebih dari 30 transaksi perhari per unit usaha mulai dari unit usaha beroperasi sampai tutup pada dini hari. Produk yang dihasilkan di Pantai Warna Oesapa hampir sejenis dengan produk dari Pantai Lasiana diantaranya pisang gepe, minuman kelapa, olahan singkong, pisang goreng, dan minuman lontar, pembedanya adalah di Pantai Warna Oesapa lebih dominan terdapat beberapa kafe yang menjual layanan karaoke dan spot foto untuk menikmati sunset. Pantai Pasir Panjang lebih dominan pada produk berbasis makanan laut seperti ikan bakar, cumi, udang, dan olahan makanan laut lainnya, yang dibakar dan bisa disajikan langsung di lokasi.

Sebelum pandemic COVID-19 datang, jumlah tenaga kerja di unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang di tiga pantai ini lebih banyak. Setiap unit usaha pariwisata bisa diisi dengan 3-4 orang tenaga kerja. Sehingga bila dikalikan dengan sampel penelitian ini, jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam penyediaan produk barang dan jasa pariwisata berjumlah sekitar $77 \text{ unit usaha} \times 3 \text{ tenaga kerja} = 231$ tenaga kerja yang merupakan masyarakat lokal kawasan pesisir Kota Kupang. Latar belakang tenaga kerja unit usaha pariwisata di Kawasan Pesisir ini adalah masyarakat lokal yang juga merupakan sanak saudara dari pemilik unit usaha pariwisata yang sudah lama membuka usaha pariwisata di pesisir Kota Kupang.

Dampak Pandemi Pada Unit Usaha Pariwisata Kawasan Pesisir Kota Kupang

Penerapan kebijakan PSBB baik secara nasional maupun lokal tetap membawa dampak terutama bagi unit-unit usaha skala kecil dan menengah yang terbiasa melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya. Kebijakan ini muncul akibat adanya pandemic COVID-19 yang berdampak besar pada hampir seluruh aspek kehidupan yang salah satu efek negatifnya adalah menyerang sektor pariwisata. Sektor ini terdampak paling besar karena meningkatnya jumlah pembatalan acara besar, pembatalan mobilisasi wisatawan dalam perjalanan wisata baik domestik maupun internasional (Sugihamertha, 2020). Tentu saja terdapat konsekuensi atau implikasi yang terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut, terutama jika dikaitkan dengan perusahaan skala kecil dan menengah seperti bisnis pariwisata.



Gambar 4. Unit Usaha Pantai Lasiana dan Gambar 5. Unit Usaha Pantai Pasir Panjang yang menggambarkan suasana selama pandemic COVID-19 berlangsung, jumlah kunjungan menurun sehingga produk yang dijual masih terpampang di kios.

(Sumber: dokumentasi pribadi penelitian 2021)

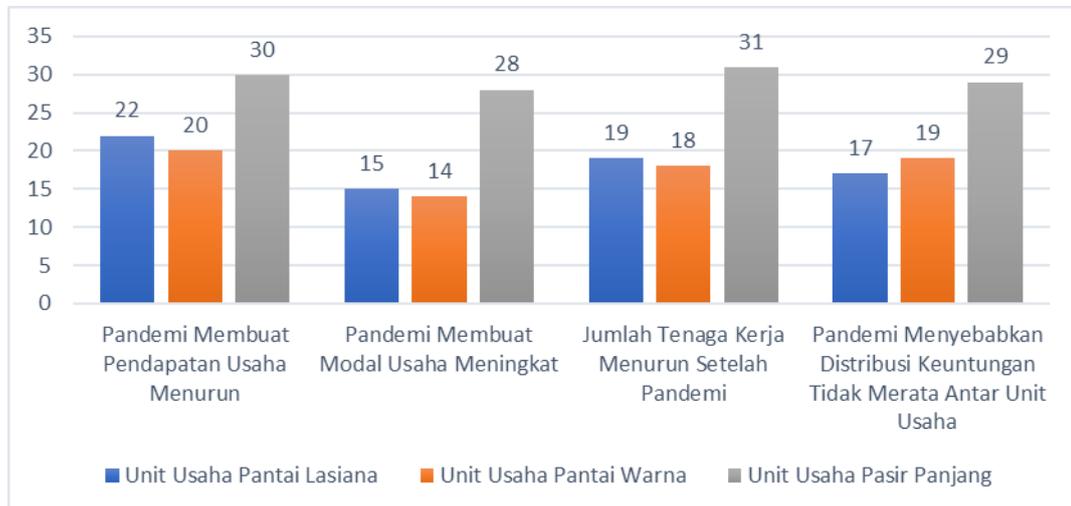
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya pendapatan bagi unit usaha pariwisata. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah mobilitas wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di pesisir Kota Kupang. Sebanyak 100% pengelola unit usaha menyatakan persetujuan bahwa COVID-19 membawa dampak yang buruk bagi produk yang dijual. Karena banyak dari unit usaha yang tidak mampu menghabiskan produk yang dijual. Jumlah kerugian yang dirasakan berbeda-beda, tergantung pada modal usaha yang dikeluarkan.

Penjualan yang minim, namun pengeluaran yang tetap membuat pengelola unit usaha pariwisata berusaha untuk dapat hidup minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebanyak hampir 100% dari seluruh jumlah sampel juga menyatakan bahwa pekerjaan sebagai pengelola unit usaha pariwisata adalah pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga unit usaha tersebut adalah mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.

Dari sebanyak total 77 unit usaha yang berhasil diwawancarai hanya sebagian kecil yang masih mengoperasikan unit usahanya. Pada hari kerja Senin – Jum'at, di Pantai Lasiana hanya beroperasi 5 unit usaha dari total sampel 23 yang berhasil diwawancarai. Berbeda dengan kondisi di Pantai Warna Oesapa berjumlah 3 unit usaha yang masih beroperasi dari 21 sampel unit usaha dan di Pantai Pasir Panjang yang berjumlah 15 unit usaha dari total unit usaha yang berhasil diwawancarai sejumlah 33 unit usaha.

Adapun jumlah sampel tersebut diperoleh dengan menemui langsung pengelola unit usaha di rumah pribadi pengelola. Sehingga jumlah sampel yang dapat dimintai keterangan menjadi lebih banyak. Rata-rata pengelola unit usaha menyatakan ingin menunggu pandemic COVID-19 mereda kemudian pengelola akan kembali membuka unit usahanya.

Tabel 2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Unit Usaha Pariwisata di Kawasan Pesisir Kota Kupang



Grafik bar pada tabel 2 adalah hasil olahan data wawancara mengenai dampak pandemic COVID-19 yang paling dirasakan oleh ke-77 sampel unit usaha pariwisata yang diwawancarai. Berdasarkan hasil tersebut, pada pernyataan mengenai pandemic yang membuat pendapatan usaha menurun, jumlah total unit usaha pariwisata menyatakan persetujuan yakni 73 unit sehingga 95% setuju bahwa pandemic membuat pendapatannya menurun. Proses interaksi wisatawan sebelum pandemic yang selalu menciptakan transaksi berbeda dengan kondisi setelah pandemic COVID-19 terjadi. Jumlah penurunan yang terjadi sekitar 70% dari jumlah pendapatan yang biasanya dihasilkan sebelum pandemic.

Selanjutnya merujuk pada dampak ekonomi pariwisata menurut (Pitana, 2009 dalam Hermawan 2016), menunjukkan indikator lain seperti jumlah modal usaha yang meningkat setelah terjadinya pandemic. Sejumlah 57 unit usaha pariwisata menyatakan setuju dengan adanya peningkatan modal usaha, setara dengan 74%. Hal ini terjadi dikarenakan terjadi kelangkaan barang setelah kebijakan PSBB diberlakukan sehingga dalam rentang waktu tertentu saat pandemic, harga barang yang akan dijadikan produk tidak terjangkau. Indikator selanjutnya adalah jumlah penurunan tenaga kerja yang terjadi selama pandemic COVID mendapatkan persetujuan di 68 unit usaha atau sekitar 88%. Penurunan tenaga kerja merupakan dampak yang dinyatakan oleh pengelola unit usaha sebagai hal yang terjadi dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Jika sebelumnya wisatawan dapat berjumlah 30 orang per hari per unit usaha. Saat ini jumlah pengunjung paling banyak hanya berjumlah 5 orang satu hari. Sehingga pelayanan unit usaha pariwisata tidak perlu membutuhkan banyak tenaga kerja. Artinya, dampak pandemic tidak hanya menyerang unit usaha pariwisata secara langsung pada pendapatan, namun juga secara tidak langsung melalui penurunan jumlah tenaga kerja yang berarti menutup kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Selanjutnya adalah adanya distribusi keuntungan unit usaha yang tidak merata bagi unit usaha dijawab oleh 65 unit usaha pariwisata atau 84% dari seluruh sampel. Hal ini

terkait dengan kebiasaan era normal baru bagi wisatawan yang cenderung membawa makanan pulang daripada makan ditempat. Penerapan kebijakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) membuat wisatawan lebih senang membeli produk makanan dan membawanya pulang sehingga seringkali unit usaha yang mendapatkan transaksi hanya mereka yang berada di posisi strategis seperti didekat pintu keluar daya tarik wisata, atau berada paling depan didekat jalan raya tempat dimana daya tarik wisata berada. Selain dampak-dampak tersebut, pengelola unit usaha menambahkan adanya kesulitan dalam pembayaran tempat sewa usaha yang setiap bulan tetap ditagih oleh pemerintah setempat. Namun, pengelola unit usaha pariwisata berupaya untuk bernegosiasi untuk mendapatkan perpanjangan waktu pelunasan biaya sewa sampai mendapatkan transaksi dengan wisatawan yang datang.

Upaya Membangkitkan Kembali Unit Usaha Pariwisata Pada Era Normal Baru Pariwisata NTT

Setelah dibahas mengenai dampak pandemic COVID-19 pada unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang, selanjutnya adalah pembahasan mengenai upaya untuk membangkitkan kembali kondisi unit usaha pariwisata dengan menerapkan protocol kesehatan ketat pada era normal baru. Pemerintah mulai melonggarkan kebijakan dengan penerapan era normal baru bagi wisatawan untuk melakukan mobilitas perjalanan ke destinasi pariwisata dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Hal ini merupakan sebuah langkah awal dan peluang bagi unit usaha pariwisata untuk dapat kembali memperoleh keuntungan dengan melakukan transaksi di daya tarik wisata pesisir. Upaya yang dilakukan pada penerapan era normal baru adalah pengadaan fasilitas kesehatan berupa tempat mencuci tangan, pengadaan tandon air, pengecekan suhu tubuh bagi setiap petugas dan wisatawan serta himbuan untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan saat berwisata.

Selama penerapan era normal baru ini, jumlah wisatawan yang datang dipantau agar tetap sesuai dengan protocol kesehatan sehingga tidak terlalu berkerumun di suatu destinasi wisata. Setidaknya terdapat tiga fase yang sedang dilakukan dalam penerapan era normal baru ini. Fase pertama adalah fase yang harus dilewati oleh wisatawan, petugas destinasi, maupun unit usaha pariwisata di destinasi yakni fase pembelajaran penerapan protocol kesehatan yang pada masa ini mulai berdatangan wisatawan nusantara yang sudah merasa bosan dengan kebijakan PSBB dan mulai mendatangi daya tarik wisata dalam hal ini pariwisata pesisir Kota Kupang.

Selanjutnya adalah pada fase kedua yakni mulai dibukanya kembali jalur transportasi baik melalui darat, laut, maupun udara baik antara wilayah di NTT maupun dari pulau lain menuju NTT sehingga membuka peluang kunjungan wisatawan ke kawasan pesisir Kota Kupang (Tokan, 2020). Kemudian berlanjut ke penerapan era normal baru dimana kunjungan wisatawan diharapkan dapat kembali seperti sebelum pandemic COVID-19. Namun, kondisi ini tetap dengan catatan protocol kesehatan yang harus diterapkan secara disiplin serta menjadi kebiasaan baru pada sektor pariwisata. Pengelola unit usaha harus dapat memproyeksi bahwa industri pariwisata saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam level lokal maupun global akibat pandemic. Saat ini, faktor kesehatan dan keamanan wisatawan dalam kegiatan pariwisata menjadi aspek yang utama dalam penentuan belanja wisatawan di destinasi pariwisata. Wisatawan mulai memperhatikan mengenai kebersihan area makan dan minum, tempat

berusaha, lokasi pembelian souvenir, serta kegiatan wisata yang selalu berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan keamanan.



Gambar 6. Sertifikasi CHSE bagi Destinasi Pariwisata
(sumber: Web. Kemenparekraf, 2021)

Dalam menerapkan upaya membangkitkan kembali aktivitas unit usaha pariwisata tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja. Tentu selain pemerintah setempat, seluruh elemen pengelola unit usaha pariwisata juga turut andil dalam pengelolaan daya tarik wisata sehingga terbangun sistem yang membuat wisatawan merasa aman dan nyaman untuk berkunjung dan kembali berwisata, makan, dan minum di lokasi daya tarik wisata. Unit usaha pariwisata di masa pandemic COVID-19 harus beradaptasi dalam mengamati perubahan perilaku wisatawan dan mempelajari peluang dari perubahan tersebut agar semakin berkembang. Salah satunya dengan fokus menyiapkan standar penerapan *Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable* (kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan) dalam operasional bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kepercayaan wisatawan agar mau membelanjakan uangnya pada sektor pariwisata terutama di unit-unit usaha kawasan pesisir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerugian yang diperoleh sektor pariwisata karena pandemic COVID-19 merupakan sebuah kepastian dan telah dirasakan oleh berbagai pihak pendukung kegiatan pariwisata. Khususnya dalam penelitian ini dampak yang dirasakan oleh pengelola unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang yang berhasil dimintai keterangan berjumlah 77 unit usaha pariwisata yang tersebar di 3 daya tarik wisata pantai favorit di Kota Kupang yakni Pantai Lasiana, Pantai Warna Oesapa, dan Pantai Pasir Panjang.

Dampak pandemic COVID-19 pada pengelola unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang terbagi menjadi empat yakni (1) Dampak terhadap pendapatan yang mengalami penurunan sejumlah 70%, (2) Dampak terhadap meningkatnya modal usaha yang harus dikeluarkan akibat adanya kelangkaan bahan mentah ketika PSBB berlangsung, (3) Dampak pada tenaga kerja yang harus dikurangi akibat menurunnya jumlah wisatawan yang belanja di unit usaha pariwisata, dan (4) Dampak pada tidak

meratanya distribusi keuntungan antara unit usaha pariwisata yang masih bertahan untuk membuka lapak dagangnya dikarenakan kebiasaan wisatawan yang cenderung membawa makanan dan minuman pulang ke rumah.

Dampak negatif yang muncul ini tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir efek negatifnya yang lebih jauh dengan meningkatkan penerapan protocol kesehatan di era normal baru. Pengelola unit usaha pariwisata bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyediakan rasa aman dan nyaman di destinasi pariwisata. Salah satu usahanya dengan penerapan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable*) di lokasi-lokasi yang menjadi pusat wisata bagi wisatawan yang dalam penelitian ini adalah Kawasan Pesisir Kota Kupang di Pantai Lasiana, Pantai Warna Oesapa, dan Pantai Pasir Panjang.

Penelitian ini merupakan permulaan dari penelitian lanjutan mengenai dampak pandemic COVID-19 bagi unit usaha pariwisata yang sangat terkait dengan ekonomi pariwisata. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada kawasan pesisir pantai merupakan peluang bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengungkap dampak pandemic COVID-19 pada unit usaha bisnis pariwisata lain seperti unit usaha kripsi yang juga mengalami dampak akibat menurunnya jumlah mobilitas wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdila, R. (2020) *Menkop Targetkan Usaha Kecil Naik Kelas dan Jumlah Wirausaha Tumbuh, Tribun Bisnis*. [Online] (diupdate 16 Januari 2020) Tersedia di: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/01/16/menkop-targetkan-usahakecil-naik-kelas-dan-jumlahwirausaha-tumbuh>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- .Baun, P. I. (2008). Kajian pengembangan pemanfaatan ruang terbangun di kawasan pesisir Kota Kupang (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- EGSAUGM. (2021). *Sebuah Pengantar oleh Divisi PIG (Pengkajian Isu Global) EGSA dalam Diskusi Eksternal "Optimism or Pessimism: Where Will Indonesian Tourism Go in 2021?"* [Online] (diupdate 5 Januari 2021) Tersedia di: <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/02/11/pariwisata-indonesia-di-tengah-pandemi/>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- Fabriza, R. (2020). Dampak Virus COVID-19 Bagi Mahasiswa. Unisbank. Ac. Id, hal, 1-6. [Online] (diupdate 16 Juni 2020) Tersedia di: <https://www.unisbank.ac.id/v2/news/dampak-besar-corona-terhadap-industri-pariwisata/>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- Fanggidae, R. E., Pello, T. A., & Nyoko, A. E. (2019, November). The Effect of Visiting Decisions on Destination Images Post Disaster. In International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 19) (pp. 216-220). Atlantis Press.
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105-117.

- Hidayat, A. A. N. (2021). *Dampak Pandemi, Kadin: Kerugian Sektor Pariwisata Rp 10 T Selama 2020*. [Online] (diupdate 11 Januari 2021) Tersedia di: <https://bisnis.tempo.co/read/1422053/dampak-pandemi-kadin-kerugian-sektor-pariwisata-rp-10-t-selama-2020/full&view=ok>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- PH, B. (2005). Food Product Management di Hotel dan Restoran Rosita, R. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Raditya, I. N. (2020). *Apa Itu 3M untuk Mencegah & Menekan Penularan Virus COVID-19?*. [Online] (diupdate 2 Oktober 2020) Tersedia di: <https://tirto.id/apa-itu-3m-untuk-mencegah-menekan-penularan-virus-covid-19-f5tV>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- Ramalan, S. (2021). *Dampak Pandemi, Wisatawan Labuan Bajo Anjlok 82 Persen*. [Online] (diupdate 5 Januari 2021) Tersedia di: <https://www.idxchannel.com/economics/dampak-pandemi-wisatawan-labuan-bajo-anjlok-82-persen>. [diakses pada tanggal 5 Desember 2020]
- REVIEW RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTURJANGKA MEMENENGAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-2021. [Online] (diupdate 5 Januari 2020) Tersedia di: https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1501383405Bab_2_PROFIL.pdf. [diakses pada tanggal 5 Desember 2020]
- Setyawan, F. E. B., & Lestari, R. (2020). Challenges of stay-at-home policy implementation during the Coronavirus (Covid-19) pandemic in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8, 15-20.
- Shalihah, N. F. (2020). *Total 1,9 Juta Pekerja Di-PHK dan Dirumahkan akibat Pandemi Virus Corona, Tren*. [Online] (diupdate 25 September 2021) Tersedia di: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/081000465/total-19-jutapekerja-di-phk-dan-dirumahkanakibat-pandemi-viruscorona?pag>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- Sugihamretha, I. D. G. (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 191-206.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan Citra Instansi Pada Publik Eksternal. *Jurnal Komunikasi*, VIII (September), 47-54
- Tokan, B. (2020). *Menggairahkan kembali pariwisata NTT di tengah pandemic*. [Online] (diupdate 15 Juli 2020) Tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/1612346/menggairahkan-kembali-pariwisata-ntt-di-tengah-pandemi>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- Widjaja, A. (2021). *Dampak yang Diterima Pariwisata Indonesia Selama Pandemi Virus COVID-19*. [Online] (diupdate 5 Januari 2021) Tersedia di: <https://tangerangnews.com/nasional/read/34316/Dampak-yang-Diterima>

Pariwisata-Indonesia-Selama-Pandemi-Virus-COVID-19. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]

- Wilibardus, D. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 untuk Pelaku Pariwisata di Sikka*. [Online] (diupdate 7 September 2020) Tersedia di: <https://www.liputan6.com/regional/read/4349298/dampak-pandemi-covid-19-untuk-pelaku-pariwisata-di-sikka>. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
- Wirateja, Anak Agung Bagus. (2014). “Penanganan Dampak Perkembangan Pariwisata Dalam Aspek Lingkungan Fisik, 80 Sosial, Ekonomi dan Budaya Bali” (Suatu Tinjauan Pustaka). *FORUM MANAJEMEN*, 12 (2), Tahun 2014
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283-304.